



KORUPTOR DILARANG NYALEG, TAPI...

**Diperbolehkan Jika Sudah 5 Tahun Bebas Bui,
KPU Konsultasi ke Pemerintah-DPR RI**

Kabar baik datang dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang mantan narapidana koruptor mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (caleg). Tapi, lima tahun setelah keluar dari bui mereka boleh nyaleg lagi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mempelajari putusan tersebut serta bakal berkonsultasi dengan perumus undang-undang, baik pemerintah maupun DPR. Selain itu, MK meminta persyaratan atas adanya keharusan untuk menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya dan tidak menutupi latar belakang kehidupannya tersebut. Apakah 'membekukan' hak politik mencalonkan diri jadi wakil rakyat selama 5 tahun, sebanding dengan tindakannya yang merugikan negara Bisakah putusan itu memberikan efek jera, atau minimal menjadi 'benteng' antisipasi agar tidak melakukan korupsi lagi? Semoga.

(Baca Hal 11)

PUTUSAN UJI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Pasal 240 ayat 1 huruf g yang diubah awalnya berbunyi:

Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

**Government (Hal.2)
Sidang Perdana Kasus
Gagal Ginjal 13 Desember,
TPF Temukan Hak
Para Korban
Diabaikan**



MK MENGUBAHNYA MENJADI:

Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

(ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan

(iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Sidang Perdana Kasus Gagal Ginjal 13 Desember, TPF Temukan Hak Para Korban Diabaikan



Ketua TPF BPKN Muhammad Mufti.

JAKARTA - Meski sudah ada tersangkanya, namun kasus gagal ginjal akut pada anak yang diduga dipicu obat sirup belum tuntas. Hasil Tim Pencari Fakta Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (TPF BPKN), melaporkan temuan terbaru. Diketahui bilahak-hak korban dan keluarganya belum terpenuhi.

Hasil itu didapat setelah TPF BPKN melakukan wawancara kepada lebih dari 30 keluarga korban gagal ginjal akut anak. "Hasil temuan sementara TPF BPKN menunjukkan bahwa hak-hak korban gagal ginjal aku dan keluarganya belum terpenuhi. Kami sudah mewawancarai lebih dari 30 korban dan juga meminta keterangan Menkes Budi Gunadi dan pedagang obat," ujar Ketua TPF BPKN Muhammad Mufti dalam rilis yang diterima Rabu (30/11).

Mufti menjelaskan, salah satu hak korban yang belum diberikan oleh pemerintah di antaranya adalah pembebasan biaya. Wakil Ketua BPKN ini menyebut, keluarga dari korban gagal ginjal akut yang meninggal tetap diminta membayar biaya mobil jenazah. "Banyak keluarga korban yang meninggal maupun selamat belum mendapat perhatian khusus/Seharusnya pemerintah membebaskan biaya mobil jenazah," ujar Mufti.

Selain itu, keluarga korban yang selamat juga belum mendapat pendampingan psikologis. Menurutnya, keluarga korban masih dihantui ketakutan akan penyakit susulan terhadap anak mereka yang harus menjalani cuci darah pada usia muda.

Tim Pencari Fakta BPKN masih terus mewawancarai keluarga korban gagal ginjal lainnya. Mufti mengatakan lembaganya mendorong para keluarga korban untuk melapor langsung atau online.

"Mereka adalah konsumen yang dirugikan. Tugas kami melindungi dan

mendorong pemenuhan hak mereka," katanya.

Tidak hanya mewawancarai puluhan korban yang dirugikan, TPF BPKN juga telah meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan pedagang obat.

Namun, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Kusumastuti Lukito belum memberi keterangan langsung dan mewakilkan pada salah satu direktur BPOM.

Mufti mengatakan, sampai saat ini Kepala BPOM Penny Lukito masih belum memberi keterangan langsung kepada tim pencari fakta. Sedangkan laporan yang didapat berasal dari wakil yang ditunjuk oleh BPOM. "Kami berharap Ibu Penny bisa memberi keterangan secara langsung agar TPF mendapat gambaran komprehensif soal kasus keracunan obat sirup," ujar Mufti.

TPF BPKN juga meminta pemerintah memperhatikan keluarga dari korban yang telah meninggal maupun yang selamat baik dalam bentuk santunan dan kompensasi.

Tim pencari fakta akhirnya

memperpanjang masa tugas sampai 9 Desember 2022. Menurutnya, masih terdapat sejumlah hal yang harus diverifikasi.

"Kami akan menyampaikan hasil temuan secepatnya kepada publik," tandasnya.

Pembentukan tim pencari fakta kasus gagal ginjal terhadap anak dilakukan berdasarkan merebaknya kasus gagal ginjal anak yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan pada 6 November 2022.

Gugatan Korban

Terpisah, kuasa hukum keluarga korban gagal ginjal akut (acute kidney injury/AKI) Tegar Putuhena mengatakan bahwa sidang perdana gugatan keluarga korban gangguan ginjal akut bakal digelar pada 13 Desember 2022 mendatang. Sidang tersebut akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

"Tanggal 13 Desember sidang perdana di PN Jakpus," ujar Tegar dalam media briefing bertajuk "Derita Korban Obat Beracun: Dinyatakan Sembuh tapi Lumpuh" di Cafe Sadjoe, Jakarta Selatan, Rabu (30/11).

Dia menuturkan, gugatan keluarga korban gangguan ginjal akut dilayangkan kepada sembilan pihak yang menjadi tergugat. Antara lain tergugat pertama adalah PT Afi Farma, sebab obat sirup dari PT Afi Farma dikonsumsi oleh 11 anak hingga meninggal dunia. Sementara pihak tergugat kedua adalah PT Universal Pharmaceutical Industries.

Perusahaan farmasi ini dijadikan tergugat kedua karena terdapat satu orang anak yang mengonsumsi Unibebi Cough Syrup sampai menjalani perawatan hingga kini. Pihak tergugat ketiga hingga ketujuh adalah pemasok bahan kimia ke industri farmasi, secara berurutan PT Tirta Buana Kemindo, CV Mega Integra, PT Logicom Solution, CV

Budiarta, dan PT Mega Setia Agung Kimia. Lalu, tergugat delapan adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) BPOM dan tergugat sembilan adalah Kementerian Kesehatan (Kemkes) Republik Indonesia.

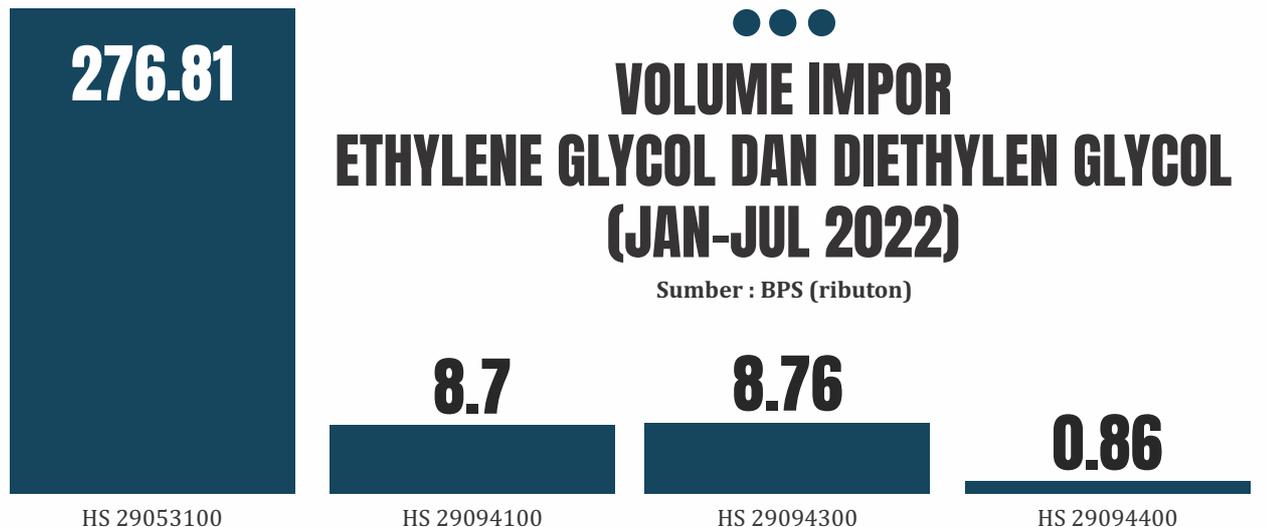
"Pihak-pihak tersebut harus bertanggung jawab atas meninggalnya ratusan anak akibat keracunan obat sirup," kata Tegar.

Lanjut dia, apalagi Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin sempat menyatakan bahwa kasus gangguan ginjal akut sudah selesai karena tidak ada penambahan kasus baru dalam beberapa pekan terakhir. Padahal masih banyak pasien yang belum sembuh dan masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), salah seorang pasien bahkan sudah dirawat hingga tiga bulan lamanya.

"Kita temukan fakta bahwa definisi sembuh yang disampaikan Menkes itu berbeda dengan apa yg ada di lapangan. Barangkali ginjalnya sembuh, tapi fungsi organ yang lain hati, saraf, sama sekali tidak bisa disembuhkan," ucap Tegar.

Isi gugatan yang dilayangkan adalah sembilan pihak tergugat dianggap telah melawan hukum karena tidak melaksanakan aturan yang harusnya dilaksanakan. Penggugat juga meminta perusahaan farmasi dan distributor yang masuk dalam tergugat 1-7 disita hartanya supaya bertanggung jawab terhadap akibat perbuatan melawan hukum. Di sisi lain, penggugat menuntut BPOM memperbaiki aturan cara pembuatan obat yang baik (CPOB). Karena jika CPOB sudah baik sejak awal, seharusnya tidak ada kejadian kasus gagal ginjal seperti yang terjadi saat ini.

Penggugat juga meminta Kemenkes menetapkan status kejadian luar biasa (KLB/outbreak) agar korban yang tengah menjalani perawatan saat ini ditanggung biaya perawatannya. Mereka meminta ganti rugi senilai Rp2,05 miliar per orang meninggal dan Rp1,03 miliar per orang sakit.(wid,ant,rls/dya)



Dugaan Suap di Universitas Lampung Seret Anggota DPR hingga Mendag, Mantan Rektor: Titipin Nama

BANDAR LAMPUNG - Rektor nonaktif Universitas Lampung (Unila) Karomani mengakui terima titipan 30 nama calon mahasiswa Universitas Lampung (Unila). Adapun orang yang menitipkan calon mahasiswa tersebut berlatar belakang Menteri, DPR RI, hingga Kepala Daerah (Bupati) dan Pengusaha.

Dari 30 nama tersebut 23 nama dititipkan untuk masuk fakultas kedokteran, sedangkan 7 nama lain dititipkan untuk masuk sejumlah fakultas lain. Hal itu terungkap saat Karomani hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi suap penerimaan mahasiswa baru (PMB) Unila 2022 dengan terdakwa Andi Desfiandi, Rabu (30/11).

Adapun dari 23 nama yang dititipkan terdapat nama Anggota DPR RI, Utut Adianto. "Pak Utut langsung menghubungi saya lewat WA menitipkan staf, itu pak Utut Anggota DPR RI sekaligus Kader PDIP," ujarnya.

"Kalau Tomas pengusaha yang punya Tegal Mas, saya rasa semua orang Lampung kenal dia," tambahnya.

Selain itu juga Thomas Aziz Rizka serta Tamanuri, Anggota DPR RI juga disebut menitipkan orang untuk masuk kedokteran Unila. "Itu Tamanuri anggota DPR RI, yang dititipkan Anak anggota DPRD provinsi," ujar Karomani. "Iya dia memberikan infak kepada pak Budi, karena dia teman dekatnya," jelasnya.

Kemudian terdapat pula nama anggota kepolisian Polda Lampung bernama Joko. "Saya lupa nama lengkap dan jabatannya, soalnya sudah pindah dari Polda Lampung," kata Karomani.

Kemudian, terdapat pula nama Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad; Rektor Untirta, Fatah Sulaiman; Alzier Dianis Thabrani, Politisi Lampung. Namun sejumlah nama ini disebut tidak memberikan uang saat menitipkan nama untuk kuliah di FK Unila.

"Saya tidak pernah memerintahkan Budi Sutomo atau Muallimin untuk meminta uang," ujarnya. Saya hanya meminta untuk bertanya apakah ingin memberi infak atau tidak," terangnya.

Lalu, ada nama kadisdikbud Sulpakar, Pendekar Banten (disebut Hengky Malonda), Asep (Keluarga Banten). "Saya asli Banten dan pengurus paguyuban Banten di Lampung," katanya.

Selanjutnya, ada dr Zam Zanariah; Khadafi, anggota DPR RI dari PKB; serta Mahfud Suroso (punya saham di RS Urip Sumoharjo). Selain itu, terdapat sejumlah nama lain yang disebutkan, namun Karomani beralasan lupa karena tidak ada nama orang tua mahasiswa yang tercantum di catatan barang bukti.



Zulhas Menepis

Nama Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan disebut menitipkan satu orang untuk diloloskan menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung atau Unila. Mendag Zulhas--begitu sapaan akrabnya pun --langsung menepis kabar itu. Dia mengklaim tidak memiliki kemenangan yang mendaftar di kampus tersebut. "Saya tidak punya ponakan yang daftar ke Unila," kata Zulkifli Hasan.

Zulhas juga mengklaim tidak mengenal Karomani. Tidak hanya itu, dia juga mengakui tidak pernah memberikan uang kepada pihak Unila. "Apalagi kasih uang, juga tidak kenal dengan Prof Karomani," tambahnya.

Sebelumnya, Karomani sebut Zulkifli Hasan pernah menitipkan seseorang untuk dimasukkan sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran di universitas tersebut saat penerimaan mahasiswa baru (PMB) 2022. "Zulkifli Hasan ikut menitipkan satu orang untuk diloloskan menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung," kata Karomani. Karomani menjelaskan seorang calon mahasiswa berinisial ZAG itu dititipkan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung Ary Meizari Alfian, yang mengatakan bahwa calon mahasiswa itu adalah titipan Zulkifli Hasan. "Saya diberi tahu oleh Ary, 'ZAG ini keponakan Pak Zulkifli (Hasan), tolong dibantu'. Saya bilang asal sesuai SPI

dan nilai passing grade-nya, passing grade 500 ke atas bisa dibantu," tambah Karomani.

Dia menjelaskan ZAG kemudian memberikan 'infak' setelah dinyatakan lolos. Akan tetapi, soal jumlah uang yang diberikan, Karomani mengaku tak tahu pasti karena yang menerima uang tersebut adalah Muallimin, orang kepercayaan Karomani. Terkait nilai standar yang Karomani sebutkan itu, jaks penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan bukti bahwa nilai ZAG hanya 480 dan tetap masuk Unila. Karomani mengaku dia tidak mengetahui nilai standar ZAG tidak memenuhi syarat yakni di bawah 500. "Nilai ZAG di bawah 500 baru saya tahu setelah penyidikan karena saya tidak cek satu-satu. Kalau saya tahu dari awal, pasti saya batalkan kelulusannya masuk Unila," ucap Karomani.

Dalam persidangan untuk terdakwa Andi Desfiandi, JPU KPK menghadirkan tiga orang saksi, yakni Karomani, Helmi Setiawan, dan Ary Meizari. Andi Desfiandi menjadi terdakwa perkara dugaan suap terhadap Karomani dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru Unila tahun 2022. Selain Andi Desfiandi, dalam perkara tersebut, KPK juga menetapkan Karomani, Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi, dan Ketua Senat Unila Muhammad Bari sebagai tersangka. (wid,ant,rls, ist/dya)

NAMA PEJABAT TERSERET SUAP UNILA

(Berdasarkan Kesaksian Rektor nonaktif Karomani)

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan

"Zulkifli Hasan ikut menitipkan satu orang untuk diloloskan menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung."

Anggota DPR RI, Utut Adianto

"Pak Utut langsung menghubungi saya lewat WA menitipkan staf, itu pak Utut Anggota DPR RI sekaligus Kader PDIP."

Pengusaha Tegal, Thomas Aziz Rizka

"Kalau Tomas pengusaha yang punya Tegal Mas, saya rasa semua orang Lampung kenal dia."

Anggota DPR RI, Tamanuri

"Itu Tamanuri anggota DPR RI, yang dititipkan Anak anggota DPRD provinsi. Iya dia memberikan infak"

Anggota kepolisian Polda Lampung bernama Joko.

"Saya lupa nama lengkap dan jabatannya, soalnya sudah pindah dari Polda Lampung."

Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad; Rektor Untirta, Fatah Sulaiman; Alzier Dianis Thabrani, Politisi Lampung.

"Saya tidak pernah memerintahkan Budi Sutomo atau Muallimin untuk meminta uang," ujarnya. Saya hanya meminta untuk bertanya apakah ingin memberi infak atau tidak."

Kadisdikbud Sulpakar, Pendekar Banten (disebut Hengky Malonda), Asep (Keluarga Banten).

"Saya asli Banten dan pengurus paguyuban Banten di Lampung."

dr Zam Zanariah; Khadafi, anggota DPR RI dari PKB; serta Mahfud Suroso (punya saham di RS Urip Sumoharjo).

KKB Serang Anggota Polri, Satu Anggota Meninggal



Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah (Polda) Papua, Kompol A.M. Kamal

PAPUA – Baku tembak antara Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali terjadi di Papua. Akibatnya seorang anggota Polri meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka dan peristiwa yang terjadi di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Rabu (30/11/2022) sekitar pukul 15.20 WIT.

Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Polisi Ahmad Musthofa Kamal mengungkapkan korban meninggal diketahui bernama Bripda Gilang Aji Prasetya akibat luka

tembak dibagian wajah. Satu orang dalam penanganan medis di RSUD Dekai dan satu lainnya terkena rekaset peluru dalam keadaan sadar.

"Korban yang meninggal dunia atas nama Bripda Gilang Aji Prasetya akibat luka tembak dibagian wajah, sedangkan korban atas nama Bripda Fazuarsyah terkena tembakan dibagian punggung kiri dan kini dalam penanganan intensif oleh tim medis RSUD Dekai dan Bripda Dona Bagaskara terkena rekaset peluru dibagian punggung," kata Kamal pada siaran pers yang dibagikan pada Rabu malam (30/11/2022).

Kamal menjelaskan kronologis penembakan tersebut. Awalnya sekitar pukul 15.10 WIT, 8 Personel Satgas Preventif Operasi Damai Cartenz 2022 baru saja mengikuti apel di Mapolres Yahukimo. Setelah itu mereka bergerak kembali menuju Pos KP3 Logpon.

Ketika itu ada sekelompok KKB menghadang anggota yang sedang menuju Logpon KP3 sembari berpatroli. Dalam penghadangan tersebut, para anggota KKB menembak ketiga anggota BKO Brimob Polres Yahukimo tersebut.

"Dalam perjalanan tepatnya di KM. 7, Jembatan Besi, terjadi penghadangan disertai dengan kontak senjata oleh KKB Yahukimo," kata Kamal dikutip dari Tempo.co.

Akibat kejadian itu, tiga orang anggota Polri mengalami luka tembak dan salah satunya meninggal dunia. Peristiwa ini segera mendapat respon dari Polres dan Kodim 1715 Yahukimo. Personel Gabungan Polres Yahukimo bersama Satgas Damai Cartenz dan TNI Kodim 1715 Yahukimo yang mendapat laporan melalui HT langsung bergerak menuju TKP.

Personel Gabungan TNI-Polri pun lalu tiba di lokasi. Mereka kemudian melakukan penjagaan perimeter guna mengamankan area tersebut. Baku tembak susulan pun sempat terjadi sehingga personel tim gabungan

melakukan pengejaran serta mengevakuasi tiga korban tersebut. "Aparat gabungan di Yahukimo sedang memburu para pelaku penembakan," tuturnya.

Jembatan Besi KM 7 itu memang dikenal sebagai salah satu titik rawan penyerangan oleh KKB. Pada Maret 2021, sekelompok warga sipil disebut sempat diberondong peluru oleh orang tak dikenal di sana, namun saat itu tak ada korban jiwa.

Sebelumnya, Bintara SPKT Polres Yahukimo Brigadir Muhammad Yushdar juga tewas usai ditembak orang tidak dikenal pada Selasa (29/11/2022) malam. Dikutip dari okezone.com, Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal mengatakan insiden penembakan itu terjadi sekitar pukul 23.09 WIT di Depan Bank BRI, Jalan Raya Jenderal Sudirman, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo.

Kamal menjelaskan saat peristiwa itu terjadi, Yushdar yang merupakan Bintara SPKT Polres Yahukimo hendak menuju Bank BRI guna melakukan penarikan sejumlah Uang.

"Saat ini kami sedang mengumpulkan keterangan para saksi dan melakukan olah TKP guna mengungkap pelaku penembakan tersebut hingga mengakibatkan seorang anggota Polri meninggal dunia," pungkasnya. (lut/ist/dya)

KPK Soroti Penyaluran Bantuan Gempa Cianjur

JAKARTA – Pendistribusian bantuan serta donasi untuk korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat menjadi perhatian khusus atau atensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, KPK menilai bahwa bantuan bencana alam rawan dikorupsi.

"Dari histori penanganan perkara oleh KPK, pengelolaan dana bantuan kebencanaan menjadi salah satu modus tindak pidana korupsi para pihak yang menyalahgunakan kewenangannya. Kami tidak ingin hal ini terjadi, oleh karena itu KPK juga memberikan atensi dalam pendistribusian donasi bencana Cianjur ini," kata Ketua KORPRI KPK, Cahya H Harefa, melalui keterangan resminya, Rabu (30/11/2022).

Dalam kesempatan itu, Cahya juga menyerahkan donasi kemanusiaan kepada korban gempa di Cianjur mengatakan bahwa bantuan serta donasi tersebut diserahkan langsung

ke Bupati Cianjur, Herman Suherman bersama Sekretaris Daerah, Cecep S. Alamsyah di Pendopo Kabupaten Cianjur.

Dikutip dari tempo.co, Cahya menuturkan, KPK melalui Kedeputan Koordinasi Supervisi serta Kedeputan Pencegahan dan Monitoring, secara kontinyu akan melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah Cianjur untuk memitigasi dan mencegah terjadinya risiko korupsi dana bantuan alam.

Untuk memperlancar pendistribusian donasi ini, sambung Cahya, KORPRI KPK akan menggandeng para komunitas relawan setempat. Diharapkan, seluruh bantuan untuk korban gempa Cianjur tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

"Agar donasi yang disampaikan tersebut bisa segera terdistribusi langsung kepada para korban yang membutuhkan. Semoga teman-teman di Cianjur bisa tetap tabah dan kuat



Ketua KORPRI KPK, Cahya H Harefa

menghadapi cobaan ini, dan yang terpenting tetap memiliki semangat untuk kembali pulih dan bangkit," kata Cahya.

Sekadar informasi, KORPRI KPK menyalurkan bantuan serta donasi untuk para korban gempa di Cianjur. Hal itu dilakukan sebagai wujud

solidaritas dan gotong royong. Donasi yang disampaikan tersebut, kata Cahya, merupakan penggalangan dari para insan KPK yakni Pimpinan, Dewan Pengawas, dan Pegawai.

Donasi tersebut, dibebaskan Cahya, diberikan dalam bentuk uang tunai maupun barang, seperti makanan dan minuman, pakaian, perlengkapan bayi dan anak-anak, peralatan ibadah, perlengkapan mandi, tikar, selimut, hingga tenda.

"Mewakili insan KPK, kami menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam kepada para korban bencana. Dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan donasi semoga bisa membantu para korban yang terdampak bencana ini," kata Cahya. (lut/tempo/dya)

Jokowi : Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Tertinggi di Dunia

MALUKU UTARA - Data Bank Indonesia mencatat ekonomi Maluku Utara tumbuh 27,74 persen pada kuartal II 2022, sedangkan di kuartal I mencapai 28,33 persen. Berdasarkan data tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tertinggi di dunia.

"Pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara 27 persen, tertinggi di dunia itu, nggak ada di dunia manapun pertumbuhan ekonomi sampai 27 persen," ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi, dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (30/11/2022).

Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, maka dari survei juga menunjukkan bahwa masyarakat Maluku Utara menjadi yang paling bahagia di Indonesia. Terlebih lagi tingkat inflasi di Maluku Utara juga terkendali, hanya 3,3 persen. "(Pertumbuhan ekonomi) 27 persen nggak bahagia ya kebangetan," kata Jokowi.

Jokowi menyebut ekonomi Maluku Utara bisa melonjak karena adanya hilirisasi dan industri baru. Namun, ia memperingatkan pemerintah daerah Maluku Utara untuk tetap berhati-hati dan tidak terlena dengan pencapaian ekonomi saat ini. "Kenapa saya peringatkan? Supaya yang benar ini dipertahankan, terus ditingkatkan lagi. Kalau saya puji-puji nanti kesenangan, tahu-tahu melorot jadi 5 persen," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi menyinggung saat ini dunia sedang mengalami situasi yang sulit karena lonjakan inflasi dan tren pertumbuhan ekonomi yang turun. Ditambah lagi, krisis energi, krisis pangan, yang diikuti dengan sulitnya mencari pupuk, serta krisis finansial.

Oleh karena itu, Jokowi meminta seluruh jajaran pemerintah termasuk kepala daerah, untuk berhati-hati dalam menghadapi situasi yang tidak biasa ini. Ia pun meminta agar seluruh pihak untuk bekerja keras. "Kuncinya kita harus kerja lebih keras lagi, tidak bisa kita kerja normal dalam keadaan yang tidak normal," katanya.

Sementara itu, Bank Indonesia juga memberikan beberapa laporan terkait dengan Maluku Utara, diantaranya:

Perkembangan Ekonomi Daerah

Perekonomian Provinsi Maluku Utara pada triwulan II 2022 tumbuh sebesar 27,74% (yoy), tetap tumbuh tinggi meskipun mengalami deselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 28,33% (yoy). Maluku Utara menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia untuk periode triwulan II 2022, bersama dengan Papua sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi

ketiga.

Dilihat dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi tetap didorong oleh pertumbuhan masif ekspor luar negeri sejalan dengan terus meningkatnya produksi komoditas hilir nikel, serta pertumbuhan investasi yang masuk sejalan dengan rencana pembangunan smelter di Maluku Utara. Dilihat dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara ditopang oleh tingginya akselerasi pertumbuhan dari sektor pertambangan dan industri pengolahan sejalan dengan tingginya realisasi produksi ore nikel yang dihilirisasi, serta dari pertumbuhan perdagangan dan transportasi pada momen HBKN Idul Fitri 1443H seiring semakin pulihnya kondisi ekonomi yang memengaruhi peningkatan mobilitas dan aktivitas perdagangan di Maluku Utara.

Keuangan Pemerintah

Anggaran Belanja Pemerintah Daerah secara agregat di Maluku Utara tahun 2022 mencapai Rp14,11 Triliun, dengan realisasi sampai dengan triwulan II 2022 sebesar 24% terhadap pagu anggaran. Anggaran Belanja tersebut naik 5,82% (yoy) dibandingkan anggaran pasca perubahan tahun 2021. Dari nominal tersebut, 78,57% atau Rp11,09 Triliun merupakan APBD Kabupaten/Kota dan sisanya 21,43% atau Rp3,02 Triliun merupakan APBD Provinsi Maluku Utara.

Sampai dengan triwulan II 2022 total realisasi belanja daerah mencapai 24% dari pagu anggaran atau lebih rendah dibandingkan triwulan II 2021 (24,43%). Realisasi ini tercatat baik pada belanja APBD provinsi maupun pada APBD Kabupaten/ Kota. Namun demikian, realisasi pada APBD Provinsi tercatat 27%, lebih tinggi dibandingkan realisasi APBD Kabupaten/Kota yang sebesar 23,19% dari pagu anggaran

Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi Maluku Utara yang direpresentasikan oleh inflasi Kota Ternate pada triwulan II 2022 tercatat sebesar 2,20% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2022 sebesar 1,25% (yoy). Kelompok penyumbang inflasi terbesar sepanjang triwulan II 2022 adalah Kelompok Transportasi yang mengalami inflasi sebesar 1,05% (yoy). Sedangkan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki mengalami deflasi paling tinggi yaitu sebesar 0,02% (yoy). Dari sisi komoditas, penyumbang andil inflasi tertinggi sepanjang triwulan II 2022 ialah komoditas angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, bawang merah, minyak goreng, dan rokok kretek filter.

Secara akumulasi sampai dengan Juli 2022, tercatat Provinsi Maluku Utara mengalami inflasi sebesar 2,24% (ytd), dimana pada bulan April 2022 terjadi inflasi sebesar 1,82%

(mtm). Inflasi sepanjang triwulan berjalan diprakirakan akan mengalami peningkatan dibandingkan triwulan II 2022 sebagai dampak dari meningkatnya mobilitas masyarakat seiring pelonggaran syarat perjalanan dan melandainya kasus Covid-19. Kemudian, risiko geopolitik juga berpengaruh terhadap kenaikan harga minyak dunia dan kebutuhan pangan global yang dapat meningkatkan harga kebutuhan pangan di Maluku Utara.

Analisis Stabilitas Keuangan Daerah

Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang kembali mencatatkan pertumbuhan tertinggi di Indonesia pada triwulan II 2022 serta semakin landainya penyebaran Covid-19 berdampak positif terhadap kinerja perbankan khususnya pada ekspansi penyaluran kredit. Hal ini sejalan dengan optimisme perusahaan yang kembali melakukan ekspansi bisnis. NPL pada kredit konsumtif relatif mengalami peningkatan dari 0,88% menjadi 0,97%. Walaupun meningkat, namun NPL tersebut masih jauh berada dibawah 5%. Sementara itu NPL pada kredit produktif mengalami penurunan dari 2,98% menjadi 1,97%. Selain itu, secara keseluruhan NPL masih berada dibawah 2% ditengah akselerasi pertumbuhan kredit. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa ekspansi perbankan masih diimbangi oleh stabilitas sistem keuangan di Provinsi Maluku Utara pada triwulan II 2022 yang masih terjaga.

Perkembangan Sistem Pembayaran

Sepanjang triwulan II tahun 2022, terjadi peningkatan transaksi pembayaran tunai seiring dengan adanya momen Bulan Ramadhan dan HBKN Idul Fitri 1443 H. Dari sisi transaksi tunai, secara agregat terjadi aliran keluar (net outflow) transaksi uang kartal antara Bank Indonesia dengan perbankan sebesar Rp379 Miliar.

Sedangkan dari sisi non tunai, transaksi RTGS dan SKNBI mengalami penurunan sebagaimana pola di setiap awal tahun. Kendati demikian, transaksi digital seperti penggunaan QRIS dan e-commerce terus mencatatkan pertumbuhan positif.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Maluku Utara



Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). (Istimewa)

pada Semester I 2022 tercatat sebesar 4,98%, meningkat sebesar 0,27 basis poin dibandingkan periode pencatatan Semester II 2021 yang tercatat sebesar 4,71%, namun lebih baik dibandingkan posisi semester I 2021 yang tercatat sebesar 5,06%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masyarakat Maluku Utara juga terus mengalami peningkatan yang sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas serta jumlah angkatan kerja yang bekerja.

Pada triwulan II 2022 Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) yang menjadi salah satu parameter kesejahteraan petani di Maluku Utara memperoleh indeks 106,22, mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 107,38 atau menurun sebesar 1,16 basis poin dibandingkan triwulan sebelumnya. NTP Provinsi Maluku Utara pada triwulan II 2022 berada pada peringkat ke-3 (tiga) dari 10 (sepuluh) provinsi di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua).

Prospek Perekonomian

Perekonomian Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022 diproyeksikan mengalami akselerasi dibandingkan tahun 2021 sejalan dengan semakin pulihnya kondisi perekonomian pasca membaiknya penanganan untuk pandemi Covid-19 serta tingginya akselerasi perekonomian yang ditopang oleh industri pengolahan nikel. Dari sisi permintaan, akselerasi perekonomian pada triwulan II 2022 didorong oleh semakin bertambahnya investasi, serta akselerasi ekspor luar negeri. Dari sisi LU, sektor industri pengolahan serta pertambangan dan pengalihan akan menjadi sektor utama yang menopang pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan.

Tekanan inflasi Maluku Utara pada tahun 2022 diperkirakan akan melebihi target inflasi nasional sejalan dengan perubahan cuaca yang sering terjadi, semakin baiknya tingkat konsumsi masyarakat, serta kenaikan harga minyak dunia yang berdampak pada harga angkutan, khususnya angkutan udara. (lut/ist/dya)



AKBP VERONICA YULIS PRIHAYATI,

**Perwira Polri Istri Calon Panglima
Yudo Margono**



LAKSAMANA YUDO MARGONO

NAMA Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono ditunjuk menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022.

Nama Yudo diumumkan langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani setelah menerima surat presiden (surpres) dari Presiden Joko Widodo yang diantarkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/11/2022).

Puan meyakini bahwa Presiden mempunyai banyak pertimbangan dalam menunjuk Yudo untuk memegang tongkat komando Panglima TNI, salah satunya ihwal nasionalisme yang ada pada diri abituren Akademi Angkatan Laut (AAL) 1988 itu.

"Tentu saja banyak hal yang menjadi pertimbangan kinerja, kemudian nasionalisme, rasa cinta Tanah Air, dan lain sebagainya, dan itu saya rasa sudah memenuhi syarat yang

ada," ujar Puan di Gedung DPR, Senin sore.

Istri perwira menengah Polri

Penunjukannya menjadi calon Panglima TNI menjadi puncak dari perjalanan panjang kemiliteran Yudo di tubuh TNI AL.

Akan tetapi, pencapaian Yudo juga tak lepas dari dukungan sang istri, AKBP Veronica Yulis Prihayati, yang merupakan perwira menengah Korps Bhayangkara.

Veronica saat ini bertugas di Badan Pemeliharaan Keamanan (Bahakam) Polri. Di internal TNI AL, Veronica aktif terlibat dalam berbagai kegiatan dengan posisinya sebagai Ketua Umum Jalasenastri.

Veronica nyaris tak pernah jauh dari Yudo ketika menghadiri suatu agenda, baik yang

bersifat internal maupun eksternal TNI AL.

Kehadiran Veronica dalam setiap kegiatan Yudo tak ubahnya sebagai pengawal setia untuk menjamin keamanan dan keselamatan sang suami.

Ketika Yudo memeriksa prajuritnya yang bertugas di Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), ia turut hadir.

Begitu juga saat Yudo memimpin langsung operasi amfibi dalam latihan bersama Super Garuda Shield 2022 di Pantai Todak, Singkep, Kepulauan Riau, Kamis (4/8/2022).

Dalam aksinya, Yudo menaiki kendaraan tempur amfibi jenis LVT-7A1 dengan mengarungi Pantai Todak.

Veronica yang menyaksikan aksi sang

suami tampak begitu antusias.

Veronica Yulis dan Laksamana Yudo Margono bahkan sempat viral saat aksinya bergoyang mengikuti lagu 'Ojo Dibanding-bandingke' yang dinyanyikan Farel Prayoga saat perayaan HUT Kemerdekaan RI di Istana Negara pada 17 Agustus 2022.

AKBP Veronica Yulis Prihayati biasa dipanggil pula sebagai Ny. Vero Yudo Margono lahir di Yogyakarta.

Ia hidup dan dibesarkan di kota Kertosono yang kemudian menikah dengan Laksamana Yudo Margono pada 21 Oktober 1992.

Kini suaminya menjabat sebagai KSAL Republik Indonesia ke 27 yang diangkat sejak 20 Mei 2020.

Selama 30 tahun menikah AKBP Veronica Yulis Prihayati dan Laksamana Yudo Margono keduanya dikaruniai 3 anak laki-laki yaitu Novendi Wira Yoga, Ditya Wira Adibrata, dan Noval Wira Abiyuda.

Kebahagiaan keluarganya semakin lengkap lagi sekarang ini telah hadir cucu perempuan mereka bernama Jasmine.

Karir

Dalam mendampingi sang suami yang berpangkat Perwira Tinggi TNI AL, apalagi menjabat sebagai KSAL ia menjadi bagian dari Jalasenastri (organisasi istri TNI AL).

Pada organisasi Jalasenastri ia lebih dikenal dengan nama Ny. Vero Yudo Margono mengikuti nama sang suami.

Sebagai istri dari Laksamana Yudo Margono, dalam organisasi Jalasenastri menjadi Ketua Umum Jalasenastri.

Ia dalam karirnya sendiri di kepolisian menjadi seorang Polisi Wanita (Polwan) berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).

Kini, AKBP Veronica Yulis Prihayati diketahui berdinastikan di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) bidang Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam). (berbagai sumber)





PENONTON PIALA DUNIA 2022 DI QATAR

TERANCAM FLU UNTA

SEBUAH laporan terbaru menyatakan flu unta atau sindrom pernapasan Timur Tengah (MERS) adalah risiko baru bagi para penggemar Piala Dunia di Qatar.

Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal *New Microbes and New Infections* telah menjelaskan hal ini, dalam makalah berjudul "Risiko infeksi yang terkait dengan Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar" diterbitkan pada 22 November.

"Piala Dunia FIFA 2022 akan diselenggarakan pada saat dua Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat dari Kepedulian Internasional (PHEIC) bersamaan. Ini adalah pandemi Covid-19 dan wabah cacar monyet 2022. Sehubungan dengan Covid-19, jumlah kasus di Qatar terus dilaporkan dengan rata-rata 321 kasus harian pada November

2022," kata laporan itu dan mengutip contoh Olimpiade Musim Dingin Pyeong Ghang di Korea Selatan, di mana penyakit saluran pernapasan adalah penyebab paling umum dari penyakit tersebut.

Selain Covid, laporan tersebut menekankan pada Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS). Beberapa pakar kesehatan, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melihat MERS berpotensi menimbulkan pandemi.

Virus MERS ditransfer ke manusia dari unta dromedaris yang terinfeksi. MERS-CoV telah diidentifikasi pada dromedari di beberapa negara di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan. Secara total, 27 negara telah melaporkan kasus sejak 2012, menyebabkan 858 kematian yang

diketahui akibat infeksi dan komplikasi terkait.

"Data epidemiologis dari Qatar menunjukkan terjadinya 28 kasus MERS (kejadian 1,7 per 1.000.000 populasi) dan sebagian besar kasus memiliki riwayat kontak dengan unta," kata laporan penelitian tersebut.

Laporan itu juga menambahkan bahwa orang dengan risiko lebih besar harus menghindari kontak dengan dromedaris, unta, minum susu unta mentah atau air seni unta, atau makan daging yang belum dimasak dengan benar.

Unta dromedaris atau unta Arab adalah unta berpunuk satu. Ini adalah salah satu spesies unta tertinggi. Itu ditemukan terutama di Timur Tengah.

Gejala flu unta

Gejala MERS berkisar dari asimtomatik atau gejala pernapasan ringan hingga penyakit pernapasan akut yang parah dan kematian.

Gejala khas MERS adalah demam, batuk, dan sesak napas. Terkadang

pasien menunjukkan gejala gastrointestinal seperti diare.

Penyakit ini juga bisa menjadi parah dapat menyebabkan gagal napas yang membutuhkan ventilasi mekanis dan dukungan di unit perawatan intensif.

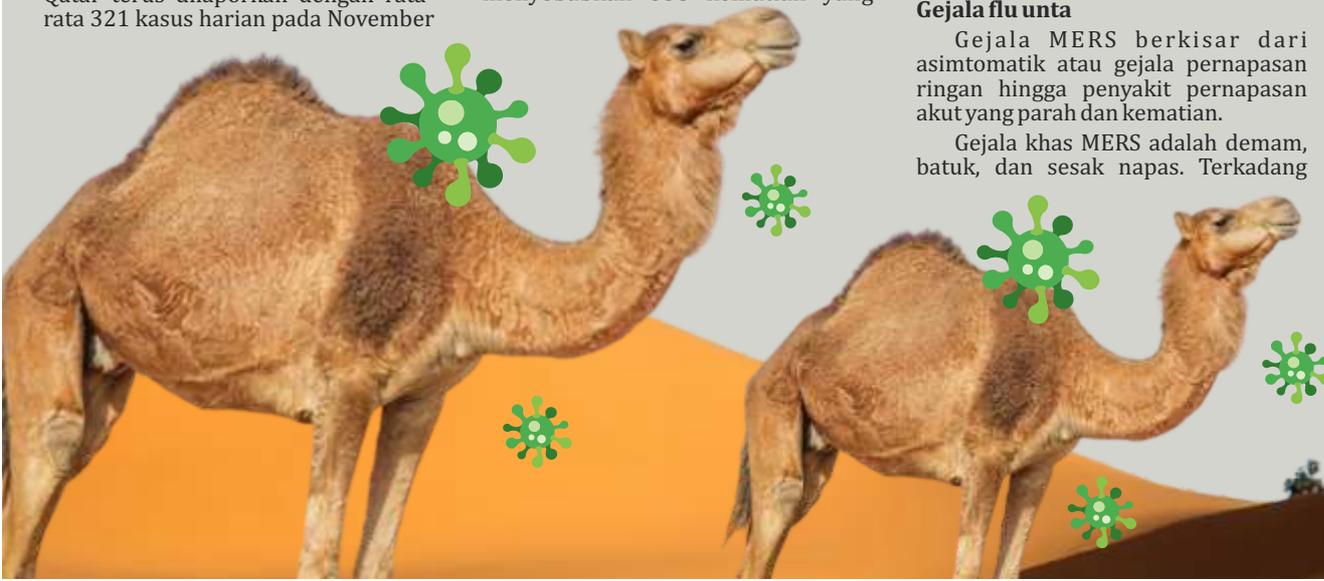
Virus ini menyebabkan penyakit yang lebih parah pada orang tua, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, dan mereka yang memiliki penyakit kronis seperti penyakit ginjal, kanker, paru-paru kronis, penyakit, dan diabetes.

Flu unta atau sindrom pernapasan Timur Tengah (MERS) ditularkan terutama kepada orang-orang dari unta yang terinfeksi.

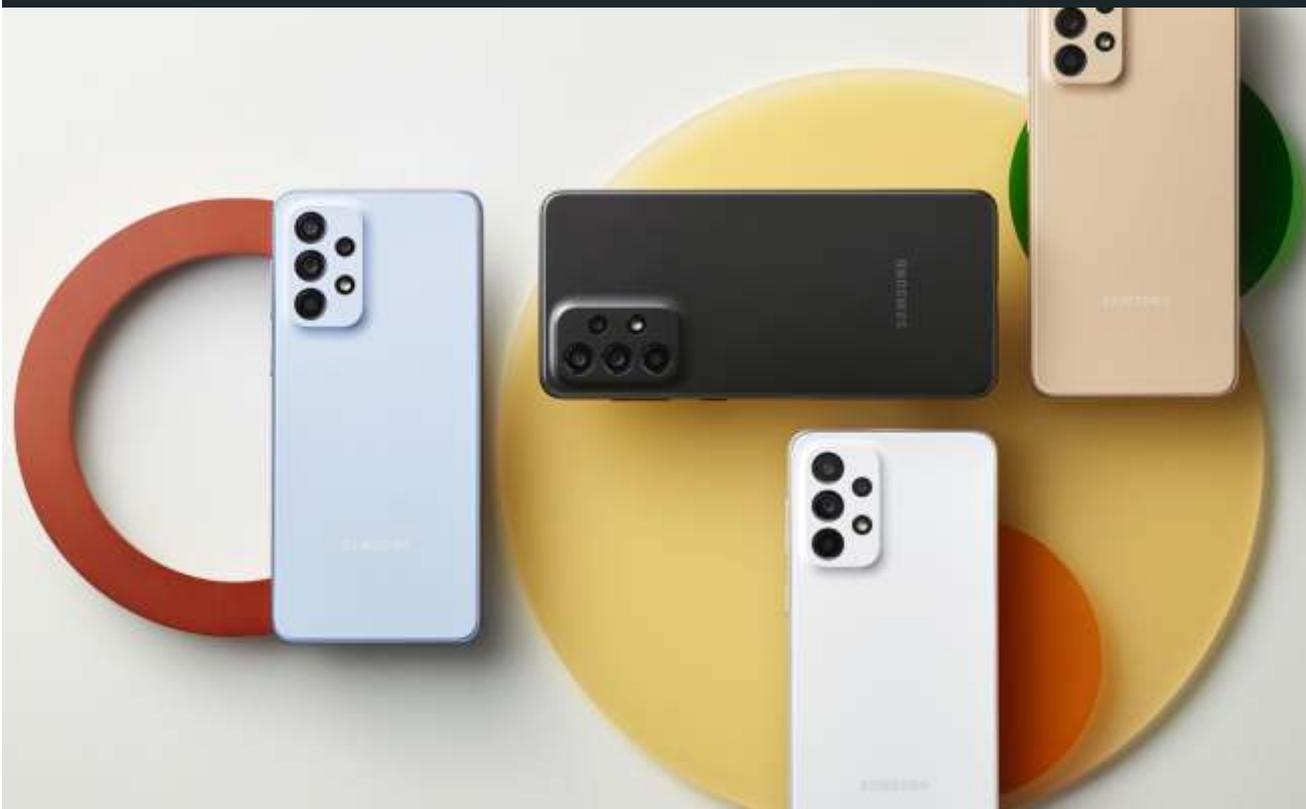
Kadang-kadang bahkan dapat menyebar di antara orang-orang dari kontak yang dekat dan tidak terlindungi.

Menurut Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja AS, seseorang yang mengalami penyakit saluran pernapasan bawah akut yang parah dan yang telah berada di fasilitas kesehatan di wilayah dengan kelompok kasus yang dilaporkan dalam waktu 14 hari sebelum timbulnya penyakit harus dievaluasi untuk MERS.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, saat ini tidak ada vaksin atau pengobatan khusus untuk MERS. Namun, ada beberapa vaksin untuk MERS yang sedang dikembangkan. Pengobatan berdasarkan kondisi klinis seseorang (Bisnis).



Rekomendasi HP Samsung Cocok untuk Kado Tahun Baru



saat mengetik," imbuhnya.

Sebagai tambahan, mulai 18 November 2022 hingga 8 Januari 2023, setiap pembelian Galaxy A33, A53, dan A73 5G secara regular maupun pembelian dengan Galaxy wearables dan produk aksesoris akan langsung dapat bonus cashback hingga Rp600.000 dan Awesome Gift senilai Rp285.000.

Galaxy A33 5G tersedia dengan harga Rp4.799.000 (8GB/128GB), dan Rp5.299.000 (8GB/256GB). Galaxy A53 5G tersedia dengan harga Rp5.799.000 (8GB/128GB) dan Rp6.299.000 (8GB/256GB).

Sedangkan Galaxy A33 5G dan A53 5G memiliki varian warna Peach, Blue, White, dan Black. Untuk Galaxy A73 5G, ada pilihan warna Mint, White, dan Gray yang tersedia dengan harga Rp7.799.000 (8GB/256GB). (Ist)

LIBUR akhir tahun jadi momen yang pas untuk memberikan kado bagi orang tersayang jelang Natal dan Tahun Baru. Salah satu yang bisa dijadikan hadiah adalah HP Samsung.

MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia Ilham Indrawan mengatakan saat ini banyak perangkat ponsel yang bisa jadi pilihan.

"Momen liburan akhir tahun ini menjadi momen yang pas banget untuk kasih holiday gift ke orang-orang tersayang, dan Galaxy A33, A53, dan A73 5G bisa jadi pilihan yang Awesome," mengutip Bisnis, Senin (26/11/2022).

Dia menyebut banyak fitur-fitur tersembunyi yang bisa dimanfaatkan dari Galaxy A33, A53, dan A73 5G. Fitur-fitur tersebut didukung dengan

bodi yang kokoh berkat sertifikasi IP67 dan Gorilla Glass 5 yang melindungi perangkat dari paparan air, goresan, hingga benturan.

Adapun fitur tersembunyi yang dimaksud antara lain side key, automation, dan haptic feedback yang memungkinkan pengguna melakukan personalisasi yang mendalam di Galaxy A33, A53, dan A73 5G.

Ilham memerinci, fitur Side key atau tombol power di samping smartphone bisa digunakan untuk meng-capture momen.

Caranya hanya dengan mengeklik dua kali Side key, bahkan dalam kondisi smartphone terkunci sekalipun.

Selanjutnya fitur automation bisa digunakan agar kinerja ponsel selalu lancar. Fitur ini bermanfaat untuk

'menyegarkan' sistem perangkat dan menjaga performanya agar tidak cepat lag.

Auto restart ini pun tidak akan mengganggu aktivitas karena pengguna bisa mengatur waktu restart yang diinginkan ketika smartphone sedang tidak digunakan.

"Tak ketinggalan fitur haptic feedback yang bisa dimodifikasi di Galaxy A33, A53, dan A73 5G agar bisa lebih hemat daya dengan mematikan haptic feedback, atau fungsi getar yang dihasilkan smartphone





CARA MENGHADAPI RESESI 2023, BISA DITERAPKAN DARI SEKARANG

RESESI adalah kondisi pertumbuhan ekonomi riil tumbuh negatif atau dengan kata lain terjadi penurunan produk domestik bruto selama dua kuartal berturut-turut dalam satu tahun berjalan.

Resesi ditandai dengan melemahnya perekonomian global dan akan mempengaruhi ekonomi

domestik negara-negara di seluruh dunia.

Kemungkinan suatu negara mengalami resesi semakin kuat apabila perekonomian negara tersebut memiliki ketergantungan pada perekonomian global.

Resiko ekonomi dapat menyebabkan terjadinya penurunan semua aktivitas ekonomi seperti keuangan perusahaan, lapangan kerja, dan investasi secara bersamaan.

Resesi Ekonomi biasanya terkait dengan adanya penurunan harga atau deflasi atau sebaliknya, kenaikan harga yang tajam atau inflasi dalam proses yang disebut stagflasi.

Berikut beberapa cara

menghadapi resesi mengutip berbagai sumber

1. Mempersiapkan Diri Jika Suatu Waktu Terkena PHK

Bank sentral akan menaikkan suku bunga demi stabilitas moneter. Di satu sisi, kenaikan suku bunga tersebut juga berdampak terhadap ketahanan keuangan sebuah perusahaan. Sehingga mau tidak mau, melakukan PHK terhadap pegawai menjadi Langkah terakhir bagi perusahaan untuk bersama-sama bertahan terhadap ancaman resesi.

Jika hal ini terjadi, masyarakat perlu mengulas kembali resume diri selama berkariyer, bahkan moment saat ini merupakan kesempatan untuk memperbarui data diri pada LinkedIn. Meningkatkan atau memulai kembali menyisihkan pendapatan dana darurat maupun cari kesempatan berkariyer di tempat lain.

2. Mulai Mempelajari Keahlian Baru

Mau tidak mau menghadapi resesi kita semua harus terus mengembangkan diri. Pepatah bijak mengatakan semakin banyak kamu belajar, semakin banyak kamu menghasilkan. Keahlian baru juga memungkinkan kamu untuk mendapatkan pekerjaan baru yang bisa jadi jauh lebih baik untuk kamu.

3. Jangan Panik Terhadap Investasi

Saat orang-orang secara massif menjual portofolio investasi mereka karena membutuhkan dana segar, maka tren tersebut sebaiknya dihindari. Sebab di awal saat menginvestasikan dana, kamu sudah lebih dulu menelaah kinerja perusahaan tersebut.

4. Cari Alternatif Penghasilan Tambahan di Luar Gaji Pokok

Masyarakat bisa memulainya dengan memanfaatkan hobi untuk mulai berbisnis dan menghasilkan pemasukan tambahan. Masyarakat juga dapat berjualan online, mengingat semakin merajainya e-commerce. Selain itu, investasi juga menjadi pilihan yang bisa diambil oleh masyarakat.

5. Minimalisir Pengeluaran yang Tidak Penting

Jika pada kondisi ekonomi normal bahkan positif, masyarakat tidak ada rasa beban membelanjakan pendapatan untuk kebutuhan yang bersifat hiburan, seperti belanja, berlangganan layanan streaming, atau menonton konser. Namun adanya ancaman resesi pada tahun 2023 mendatang, sebaiknya kebiasaan itu perlu diminimalisir atau ditunda sementara waktu. (Bisnis)



Koruptor Dilarang(dari hal 1)

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan eks narapidana koruptor dilarang maju sebagai calon anggota legislatif jika belum lima tahun keluar dari penjara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mempelajari putusan itu. "Kami akan konsultasikan materi putusan MK tersebut kepada pembentuk UU dalam hal ini Presiden dan DPR (Komisi II)," kata Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, Jakarta, Rabu (30/11).

Hasyim menerangkan pihaknya akan mengonsultasikan pemberlakuan dalam peraturan KPU (PKPU). "Apakah hanya untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi atau Kabupaten atau Kota, atau termasuk juga calon anggota DPD," ungkap Hasyim.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang diajukan oleh karyawan swasta Leonardo Siahaan.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan Perkara Nomor 87/PUU-XX/2022, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Rabu.

Permohonan yang dikabulkan tersebut terkait dengan larangan mantan narapidana korupsi atau koruptor untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif selama lima tahun sejak ia dibebaskan atau keluar dari penjara.

Menurut MK, norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Adapun Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu itu menyebutkan, bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi beberapa persyaratan.

Di antaranya, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Dengan diterimanya sebagian permohonan pemohon, MK mewajibkan negara untuk mengubah ketentuan tersebut menjadi sebagai berikut. Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi beberapa persyaratan.

Satu, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai

tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

Dua, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Lalu yang ketiga, mereka bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Menurut MK, masa tunggu lima tahun setelah terpidana menjalankan masa pidana adalah waktu yang cukup untuk melakukan introspeksi diri dan beradaptasi dengan masyarakat lingkungannya bagi calon kepala daerah, termasuk calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Meskipun begitu, MK tetap memperbolehkan mantan koruptor mencalonkan diri sebagai anggota legislatif selama mereka telah melewati jangka waktu lima tahun setelah masa hukuman.

Berikutnya, mereka juga harus jujur atau terbuka mengumumkan kepada publik mengenai latar belakang jati dirinya. Ketentuan tersebut ditujukan agar mantan narapidana korupsi atau koruptor tidak kehilangan hak politik sebagai warga negara Indonesia.

MK menilai masa tunggu 5 tahun setelah terpidana menjalankan masa pidana adalah waktu yang dipandang cukup untuk melakukan introspeksi diri dan beradaptasi dengan masyarakat lingkungannya bagi calon kepala daerah, termasuk dalam hal ini calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Demikian halnya persyaratan adanya keharusan menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya dan tidak menutupi latar belakang kehidupannya adalah dalam rangka memberikan bahan pertimbangan bagi calon pemilih dalam menilai atau menentukan pilihannya.

"Sebab, terkait dengan hal ini, pemilih dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya sebagai pilihan baik yang memiliki kekurangan maupun kelebihan untuk diketahui oleh masyarakat umum (notoir feiten). Oleh karena itu, hal ini terulang kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan terpidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut. Selain itu, untuk pengisian jabatan melalui pemilihan (elected officials), pada akhirnya masyarakat yang memiliki kedaulatan tertinggi yang akan menentukan pilihannya," ungkap majelis.

Selain itu, fakta empirik ada yang mengulang kembali tindak pidana yang sama (in casu secara faktual khususnya tindak pidana korupsi), sehingga makin jauh dari tujuan menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Oleh karena itu, demi melindungi kepentingan yang lebih besar, yaitu dalam hal ini kepentingan masyarakat

akan pemimpin yang bersih, berintegritas, dan mampu memberi pelayanan publik yang baik serta menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya, Mahkamah tidak menemukakan jalan lain kecuali memberlakukan syarat kumulatif sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum putusan-putusan MK.

"Selain itu, langkah demikian juga dipandang penting oleh Mahkamah demi memberikan kepastian hukum serta mengembalikan makna esensial dari pemilihan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yakni menghasilkan orang-orang yang memiliki kualitas dan integritas untuk menjadi pejabat publik dan pada saat yang sama tidak menghilangkan hak politik warga negara yang pernah menjadi terpidana untuk tetap turut berpartisipasi di dalam pemerintahan," bebernya.

Harusnya Ada Budaya Malu

Terpisah, anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini mengatakan, "Putusan ini sangat diperlukan selain untuk menegaskan ketentuan masa tunggu tersebut, juga penting demi kepastian hukum agar diikuti kepatuhan oleh semua pihak, khususnya KPU sebagai administrator pencalonan serta partai politik sebagai pintu masuk (gate keeper) pencalonan di pemilu legislatif," katanya.

Melalui putusan ini MK sejatinya makin meneguhkan ketentuan masa tunggu bagi pencalonan mantan terpidana sebagaimana pernah diputus MK melalui Putusan atas perkara No. 56/PUU-XVII/2019. Dalam Putusan 56 tersebut, MK kembali pada pertimbangan hukum dan substansi sebagaimana pernah diputus dalam Putusan No. 4/PUU-VII/2009 tertanggal 24 Maret 2009.

Putusan No. 4/PUU-VII/2009 sendiri merupakan hasil pengujian atas Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

"Sehingga tidak mengejutkan kalau akhirnya MK kembali memutuskan soal adanya masa tunggu atau masa jeda selama lima tahun setelah bebas penuh bagi mantan terpidana termasuk mantan terpidana korupsi untuk bisa dicalonkan sebagai caleg di Pemilu DPR, DPD, dan DPRD," ucap Titi Anggraini.

Selain itu, kata Titi, sudah semestinya partai politik malu dan menolak mencalonkan kader atau figur yang jelas-jelas pernah menjadi terpidana kasus korupsi. "Suara rakyat seharusnya tidak dipertaruhkan pada mereka yang sudah pernah gelap mata saat berurusan dengan uang dan penganggaran. Hal itu mengingat sebagai anggota parlemen ataupun pejabat eksekutif pasti akan berurusan dengan pengelolaan keuangan dan anggaran negara dalam jabatan yang dipegangnya," ujar Titi Anggraini.

Sebagai pengingat, 5 Januari 2019 ICW merilis nama-nama caleg eks napi korupsi tersebut melalui akun

Twitter-nya @antikorupsi. "Sebanyak 40 caleg mantan napi korupsi yang sedang berlagu mendapatkan bangku wakil rakyat. Catat ya tweeps! #koruptorkoknyaleg," seperti dikutip dari keterangan dalam cuitan ICW kala itu. (wid,ist,ant,icw,rls/dya)

NAMA CALEG 2019 BEKAS NAPI KORUPSI

(Versi Indonesia Corruption Watch/ICW)



PARTAI GOLKAR

Hamid Usman, DPRD Maluku Utara
Desy Yusandi, DPRD Banten
Agus Mulyadi R, DPRD Banten
Heri Baelanu, DPRD Pandeglang
Dede Widarso, DPRD Pandeglang
Saiful T Lami, DPRD Tojo Una-Una
Edy Mukdison, DPRD Blitar



PARTAI GERINDRA

Mohamad Taufik, DPRD DKI
Herry Jones Kere, DPRD Sulawesi Utara
Husen Kausaha, DPRD Maluku Utara
Al Hajjar Syahyan, DPRD Tanggamus
Ferizal, DPRD Belitung Timur
Mirhammuddin, DPRD Belitung Timur



PARTAI HANURA

Midasir, DPRD Jawa Tengah
Welhelmus Tahalele, DPRD Maluku Utara
Akhmad Ibrahim, DPRD Maluku Utara
Warsit, DPRD Blora
Moh Nur Hasan, DPRD Rembang



PARTAI AMANAT NASIONAL

Abdul Fattah, DPRD Jambi
Masri, DPRD Belitung Timur
Muhammad Afrizal, DPRD Lingga
Bahri Syamsu Arief, DPRD Cilegon



PARTAI DEMOKRAT

Jones Khan, DPRD Pagar Alam
Jhony Husban, DPRD Cilegon
Syamsudin, DPRD Lombok Tengah
Darmawaty Dareho, DPRD Manado



PARTAI BERKARYA

Meike Nangka, DPRD Sulawesi Utara
Arief Armaiyn, DPRD Maluku Utara
Yohanes Marianus Koa, DPRD Ende



PARTAI PERINDO

Samuel Buntuang, DPRD Gorontalo
Zukfikri, DPRD Pagar Alam



PARTAI BULAN BINTANG

Nasrullah Hamka, DPRD Jambi



PARTAI GARUDA

Yulius Dakhi, DPRD Nias Selatan
Ariston Moho, DPRD Nias Selatan



PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Maksum DG Mannassa, DPRD Mamuju



PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)

Matius Tungka, DPRD Poso
Joni Cornelius Tondok, DPRD Toraja Utara

CALEG DPD EKS KORUPTOR:

Syahrlul Kui Damapoli, DPD Sulawesi Utara
Abdullah Puteh, DPD Aceh
Abdillah, DPD Sumatera Utara

Hasil Autopsi Korban Tragedi Kanjuruhan Tak Ada Residu Gas Air Mata, Keluarga Anggapan Aneh

SURABAYA-Perhimpunan Dokter Forensik (PDFI) Jawa Timur mengumumkan hasil autopsi dan pemeriksaan dua jenazah korban Tragedi Kanjuruhan tak terdapat kandungan zat gas air mata.

Namun, PDFI menemukan penyebab utama kematian adalah patah tulang dengan pendarahan berat.

Hal itu diungkapkan Ketua PDFI Jatim, dr Nabil Bahasan. Ia mengaku timnya sudah menyelesaikan rangkaian proses autopsi dan pemeriksaan patologi forensik kepada dua jenazah.

"Kami tim PDFI Jatim Alhamdulillah sudah menyelesaikan semua rangkaian pemeriksaan luar, pemeriksaan tambahan, dalam kasus Tragedi Kanjuruhan terhadap dua korban," kata Nabil ditemui di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Rabu (30/11).

Dua jenazah korban Tragedi Kanjuruhan yang diautopsi itu adalah kakak beradik NDR (16) dan NDB (13). Mereka merupakan anak perempuan dari DAY (41), seorang Aremania asal Bululawang, Malang. Nabil menekankan pihaknya diberikan izin penyidik untuk memberikan penjelasan sebatas kesimpulan saja. Oleh karena itu informasi lengkap nantinya akan disampaikan di proses pengadilan.

"Jadi untuk hasil dari NDR (16). Itu didapatkan kekerasan benda tumpul. Adanya patah tulang iga, 2, 3, 4, 5. Dan di sana ditemukan perdarahan yang cukup banyak. Sehingga itu membuat sebab kematiannya," ujarnya.

Hal serupa juga ditemukan di jenazah kedua, yang tak lain adalah adik kandung NDR sendiri. Dia juga mengalami patah tulang iga. "Kemudian, adiknya NDB (13). Juga sama tapi ada di tulang dadanya. Patahnya itu. Juga di sebagian tulang iga, sebelah kanan," ucapnya.

Nabil mengaku tak bisa menyebutkan apa penyebab tulang-tulang korban itu patah. Ia hanya bisa memastikan penyebab kematian korban adalah karena kekerasan benda tumpul. "Di kedokteran forensik kita tidak bisa mengatakan itu karena apa. Tapi karena kekerasan benda tumpul. Untuk pastinya, tentu di penyidikan yang tahu," ucapnya.

Selanjutnya, di dalam tubuh korban ternyata tak ditemukan adanya kandungan zat gas air mata atau zat beracun lainnya. Hal itu, kata Nabil, merupakan pemeriksaan toksikologi yang dilakukan ahli dari Badan Riset dan Informasi Nasional (BRIN).

"Dari hasil pengumpulan sampel yang ada pada kedua korban. Kami sudah mengumpulkan kepada BRIN

dan didapatkan tidak terdeteksi adanya gas air mata tersebut," kata dia. "Untuk lebih jelasnya, nanti di pengadilan bisa didatangkan ahli dari BRIN tersebut yang memeriksa hasil sampel toksikologi kita," ucapnya.

Lebih lanjut, Nabil mengatakan, saat dilakukan autopsi dan ekshumasi, sebagian organ tubuh jenazah juga mulai membusuk. Meski demikian ia meyakini pemeriksaan in tetaplah akurat. "Jadi kedua korban ini sudah mengalami proses pembusukan lanjut. Jadi bisa dibayangkan kita melaksanakan autopsi itu, sudah dalam pembusukan lanjut," katanya.

Sebagai informasi, Tragedi Kanjuruhan terjadi usai laga Liga 1 antara Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu malam, 1 Oktober 2022. Usai laga tersebut, aparat menembakkan gas air mata setelah sejumlah supporter turun ke lapangan. Gas air mata itu ditambakkan pula ke arah tribun penonton, sehingga supporter yang merupakan Aremania panik berdesak-desakan untuk segera berebut keluar stadion.

Hasil temuan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan gas air mata memanglah sebagai pemicu utama kepanikan berujung tragedi itu.

"Yang mati dan cacat serta sekarang kritis dipastikan setelah terjadi desak-desakan setelah gas air mata yang disemprotkan," kata Mahfud dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, usai menyerahkan laporan akhir TGIPF ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Jumat (14/10).

"Adapun peringkat keterbahayaan racun dari gas itu sedang diperiksa oleh BRIN [Badan Riset dan Inovasi Nasional]," tambahnya.

Meskipun demikian, dia menegaskan apapun hasil temuan BRIN itu tak akan mengurangi kesimpulan tim yang terdiri dari tokoh-tokoh lintas sektor itu. "Tetapi apapun hasil pemeriksaan dari BRIN itu tidak bisa mengurangi kesimpulan bahwa kematian massal itu terutama karena gas air mata," kata Mahfud kala itu. Hasil penyelidikan Komnas HAM yang telah diserahkan ke Jokowi via Mahfud pun menyatakan hal yang tak jauh berbeda dengan temuan TGIPF.

Disoal Keluarga Korban

Keluarga korban menganggap aneh dengan hasil autopsi jenazah korban tragedi Kanjuruhan Malang. Devi Athok Yulfitri (43), ayah sekaligus ahli waris dari jenazah yang diautopsi

menganggap janggal dengan pengumuman hasil autopsi yang disampaikan oleh Ketua Tim Autopsi melalui konferensi pers.

"Seharusnya kuasa hukum saya, Pak Imam Hidayat mengetahui hasilnya. Alasannya akan dirilis di Pengadilan, tapi kenapa kok dr Nabil sudah bicara di media dengan penyebab kematian anak saya," ungkap Devi Athok Yulfitri di Kantor Pengacara Imam Hidayat, Rabu (30/11).

"Dr Nabil bilang bahwa anak saya meninggalnya karena tulang rusuk patah, si Natasha itu beberapa tulang rusuk patah dan tidak ada gas air mata. Dan si Nayla cuma satu yang patah," ungkap Devi Athok.

Jasad dua korban tragedi Kanjuruhan Natasya Deby Ramadhani (16) dan Nayla Deby Anggraeni (13) diperiksa secara forensik. Kedua almarhumah merupakan anak perempuan dari Devi Athok Yulfitri.

"Ini tidak masuk akal sama sekali dengan kondisi fisik waktu Natasya dan Nayla dibantai di Kanjuruhan. Saya katakan dibantai karena, kok hasilnya tidak sama. Ini mungkin rekayasa dari oknum kepolisian, titipan kan tidak tahu. Ini sudah tidak bener, kasus ini sudah tidak bener," ungkapnya.

Devi Athok, sambil memperlihatkan foto-foto jenazah putrinya mengaku tidak menemukan ciri fisik yang memperlihatkan putrinya patah tulang iga. Jenazah putrinya masih lengkap dengan baju yang masih bersih, sehingga merasa aneh dengan hasil autopsi tersebut. "Kalau sesuai dengan foto anak saya ini, dengan kondisi yang katanya patah-patah dan pukulan-pukulan ini anak saya tidak ada bekas injak-injakan. Tidak ada sama sekali bekas injakan," ungkapnya.

"Waktu itu Stadion kan hujan seharusnya, (seandainya terjadi) pukulan oknum kepolisian dan injak-injakan pasti ada ini. Ini tidak ada. Bersih bajunya, tidak ada (bekas)," ungkapnya.

Saat autopsi, lanjut Devi Athok, melihat kepala anaknya ditemukan bekas lula pecah tidak beraturan. Devi menduga luka tersebut akibat



Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) Cabang Jawa Timur dr. Nabil Bahasan saat menjelaskan hasil autopsi terhadap dua jenazah Aremania korban Tragedi Kanjuruhan, Malang saat ditemui di Universitas Airlangga Surabaya, Rabu (30/11/2022). (foto:ant)

tembakkan gas air mata yang mengenai putrinya langsung. "Ini dokter sudah enggak benar. Nayla ini berbusa, masak diinjak-injak itu sampai berbusa. Kan tidak masuk akal. Kalau enggak karena racun gas air mata yang kedaluwarsa itu," katanya. "Ini saya foto terakhir di RS Wawa, masih keluar busa dan masih bau amoniak masih ada. Enggak benar ini," katanya.

Ekshumasi dilaksanakan di TPU Dusun Patuk, Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, pada Sabtu (5/11). Sampel yang diambil dibawa ke laboratorium untuk diteliti sesuai dengan kebutuhan penyelidikan. Pemeriksaan dilakukan di laboratorium independen.

Tim independen melakukan autopsi dengan beranggotakan dua penasehat enam operator. Tim terdiri dari tiga elemen institusi pendidikan kedokteran dan empat dari fasilitas kesehata. Anggota Tim Kedokteran berasal dari Fakultas Kedokteran Hang Tuah Surabaya, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya dan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). (mira,santi,ant,rls/dya)

●●●

**KESIMPULAN DARI PROSES
AUTOPSI TIM PDFI JATIM**

Jenazah Natasya Debi Ramadhani

- Tanda bekas kekerasan benda tumpul
- Patah tulang pada susunan tulang iga (2, 3, 4, 5)
- Terdapat pendarahan dalam kategori jumlah yang banyak.

Jenazah Nayla Debi Anggraeni

- Mengalami patah tulang sebagian pada susunan tulang iga sisi kanan